

**Bidang Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

No.	SKPD	Bidang Tugas
1.	Badan Kepegawaian Daerah	Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan, Pengembangan dan Pemberdayaan SDM, Mutasi dan Pensiun, Informasi dan Data Kepegawaian serta Korp Pegawai Negeri Sipil
2.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi, Pusat Data dan Informasi BPBD serta Pusat Pengendalian Operasional BPBD
4.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Aset serta Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
6.	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok, Restribusi dan Pendapatan Lainnya, Samsat, Pusat Informasi Pendapatan serta Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Pengembangan Kompetensi Manajerial
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Wilayah, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Aplikasi Informasi Geospasial
9.	Badan Penghubung Daerah Provinsi	Hubungan antar Lembaga dan Kemitraan, Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat serta Fasilitasi Program , Informasi dan Promosi
10.	Biro Administrasi Pembangunan	Layanan Pengadaan meliputi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bina SDM dan Distribusi, Informasi dan Advokasi, Bina Usaha Jasa meliputi Usaha dan Jaringan Jasa konstruksi, Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan, Pengendalian Pembangunan

		meliputi Bina Sosial Budaya dan Pembangunan, Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan, Administrasi dan Fasilitas Pekerjaan Umum
11.	Biro Bina Perekonomian	Administrasi dan Perekonomian Umum meliputi Perdagangan, Industri dan Promosi, Transportasi dan Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Daerah meliputi Ekonomi Masyarakat Kurang Sejahtera, Pembinaan BUMD, Pengendalian Inflasi Daerah, Pengembangan SDA dan Produksi Holtikultura meliputi Pengelolaan Energi, SDA dan Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian, Perikanan dan Peternakan
12.	Biro Hukum	Perundang-undangan meliputi produk hukum dan informasi hukum, Fasilitas produk hukum Kabupaten/kota serta Bantuan hukum meliputi sengketa dan penyuluhan HAM
13.	Biro Humas dan Keprotokolan	Humas meliputi Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi, Hubungan antar Lembaga; Pelayanan Media dan Informasi; Keprotokolan meliputi Acara Keprotokolan, Hubungan Keprotokolan dan Ketatausahaan Pimpinan
14.	Biro Organisasi	Kelembagaan meliputi Kelembagaan Provinsi, Bina Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Data Perangkat Daerah dan Kelembagaan BUMD; Ketatalaksanaan meliputi Tatalaksana Pemprov, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota; Akuntabilitas dan Analisis Jabatan meliputi Perencanaan dan Penilaian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Budaya Kerja, Analisis Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum
15.	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	Penataan Daerah dan Hubungan antar Lembaga, Pendapatan Daerah, Fasilitas Kerjasama Luar dan Dalam Negeri, Penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi Administrasi Kewenangan, Penyelenggaraan Pemda dan Kelengkapan Perangkat Kabupaten/Kota
16.	Biro Pemerintahan	Ketertiban dan ketenteraman umum, Pemerintahan Kecamatan, kelurahan dan desa, Batas antar negara, provinsi dan kabupaten/kota, Toponimi, data wilayah dan kawasan, fasilitas pertanahan, fasilitas perangkat wilayah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan pelaporan dan evaluasi perangkat wilayah
17.	Biro Sosial dan Kesejahteraan	Fasilitas Pembinaan Keagamaan meliputi Kerukunan Agama dan mental, Bantuan dan lembaga, Urusan Haji dan Wisata Rohani; Pendidikan dan Keolahragaan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan dan Kesehatan; Pembinaan Sosial meliputi Kesejahteraan Masyarakat, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
18.	Biro Umum dan Perlengkapan	Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat, Tata Usaha Staf Ahli dan Asisten; Bagian Rumah Tangga meliputi Rumah Tangga Pimpinan, Sekretariat dan Operasional Mess dan Gedung; Pengadaan dan Perawatan dan Distribusi serta Aset Sekretariat

19.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bina Konstruksi, UPT Peralatan, UPT Pengujian dan Pengendalian Mutu, UPT Bina Marga dan Konstruksi Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, Tanjung Balai, Dolok Sanggul, Padang Sidempuan, Kotanopan, Sidikalang, Kabanjahe, Rantau Parapat, Sibolga, Gunung Tua, Tarutung, Gunung Sitoli
20.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mineral dan Batubara; Geologi dan Air Tanah; Energi; Ketenagalistrikan; UPT ESDM Wilayah I, II, III, IV,.
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Sejarah dan Kepurbakalaan; Pemasaran Pariwisata; Objek dan Usaha Pariwisata; UPT Taman Budaya; UPT Museum Negeri Provsu.
22.	Dinas Kehutanan	Penatagunaan Hutan; Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pengusahaan Hutan; Perlindungan Hutan; UPT Pengelolaan Hutan Wilayah III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
23.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Perikanan Tangkap; Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPT Pembinaan Penangkapan Ikan, UPT Budidaya Ikan Kerasaan, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello, UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan.
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Pengelolaan Administrasi Penduduk; Pemanfaatan Data dan Inovasi.
25.	Dinas Kesehatan	Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, UPT RS Khusus Mata, UPT RS Khusus Paru, UPT RS Kusta Lau Simomo, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pelatihan Kesehatan, UPT Pelayanan Ambulans, UPT RS Indrapura.
26.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Ketersediaan dan Distribusi Pangan; Konsumsi dan Keamanan Pangan; Kesehatan Hewan; Peternakan; UPT Kompetensi Keamanan Pangan, UPT Inseminasi Buatan, UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan.
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi Publik, Pengelola Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan E-Government, UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik, UPT Penyiaran Daerah, UPT Keterbukaan Informasi Publik
28.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pemberdayaan Koperasi; Pengawasan dan Pemeriksaan; Pemberdayaan Usaha Kecil ; UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM; UPT Pusat Promosi Usaha Kecil

29.	Dinas Lingkungan Hidup	Tata Lingkungan; Pengelolaan, Limbah Berbahaya dan Beracun, Persampahan; Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, UPT Laboratorium Lingkungan, UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, UPT Pengelolaan Sampah, UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli
30.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan Desa; Kelembagaan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pembangunan Kawasan Pedesaan, UPT Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
31.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; Data, Informasi Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak; Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
32.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Layanan Kepemudaan; Peningkatan Prestasi Olahraga; Pembudayaan Olahraga; Sarana Prasarana dan Kemitraan; UPT Sekolah Kebakatan Olahraga; UPT Pengelola Kawasan Pusat Olahraga.
33.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Perencanaan dan Pengembangan; Promosi; Pengawasan dan Pengendalian; Pelayanan Perijinan SDA; Pelayanan Perijinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial.
34.	Dinas Pendidikan	Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Pembinaan dan Ketenagaan.
35.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana; Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pengendalian Penduduk.
36.	Dinas Perhubungan	Lalu Lintas Jalan; Angkutan Jalan; Pelayaran; Perkeretaapian; UPT Pengawas dan Pengendalian Medan, Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Kabanjahe, Kisaran, Siantar, Tarutung, Sibolga, Sidempuan, Gunung Sitoli; UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan.
37.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka; Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan; Perdagangan Dalam Negeri; Perdagangan Luar Negeri; UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, Siantar, Kisaran, Sibolga; UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Medan; UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Medan.

38.	Dinas Perkebunan	Prasarana dan Sarana; Produksi dan Pengembangan; Pengolahan dan Pemasaran; Perlindungan dan Penataan Sumber Daya; UPT Perbenihan; UPT Pengolahan Lahan; UPT Proteksi Tanaman.
39.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi; Pembinaan SDM dan Kelembagaan; Pengolahan Bahan Pustaka dan Deposit Daerah; Arsip.
40.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
41.	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Rantau Prapat, UPT Pelayanan Sosial Tunarunggu Wicara dan Lanjut Usia Siantar, UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong, UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Sei Buluh Serdang Bedagai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netradan Tuna Daksa Tebing Tinggi, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidempuan, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidikalang-Kabanjahe, UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Brastagi
42.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Pengembangan Jaringan Sumber Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jaringan Pemanfaatan Air, UPT SDA Wampu Besitang, UPT SDA Lau Renun-Lau Biang, UPT SDA Belawan-Padang, UPT SDA Bah Bolon, UPT SDA Asahan Danau Toba, UPT SDA Kuala-Barumun, UPT SDA Batang Angkola, UPT SDA Batang Gadis-Batang-Natal, UPT SDA Sibundong-Batangtoru, UPT SDA Nias, UPT Cipta Karya Lubuk Pakam, UPT Cipta Karya Rantau Prapat, UPT Cipta Karya Pematang Siantar, UPT Cipta Karya Sibolga, UPT Cipta Karya Padang Sidempuan, UPT Cipta Karya Kabanjahe, UPT Cipta Karya Gunung Sitoli.
43.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Sarana dan Prasarana; Tanaman Pangan; Hortikultura; Penyuluhan; UPT Benih Induk Hortikultura; UPT Pengawasan Sertifikasi Benih; UPT Benih Induk Aneka Tanaman; UPT Benih Induk Padi Murni; UPT Benih Induk Palawija; UPT Mekanisasi Pertanian; UPT Perlindungan; UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian; UPT Brigade Alat Mesin Pertanian.
44.	Dinas Tenaga Kerja	Pembinaan dan Penempatan Kerja, Hubungan Industrial, Perlindungan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, UPT Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah, UPT Pelatihan Transmigrasi, UPT Tenaga Kerja.

45.	Inspektorat	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
46.	Sekretariat DPRD	Perundang-undangan , Persidangan dan Risalah meliputi Perundang-undangan, Pengkajian Hukum, Sidang dan Risalah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat